

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menengah adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar yang ditempuh dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun. Jenis dari pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Keagamaan (Madrasah Aliyah), dan yang paling umum adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan bentuk satuan pendidikan formal yang berfokus pada pendidikan umum pada jenjang menengah setelah taraf pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun sekolah lainnya yang setara dengan SMP dan MTs (Uni Wahyuni, *dkk.*, 2017: 3-6).

Sama seperti pendidikan dasar, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga memiliki pengelolaan dan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah. Berjalan baiknya fungsi dan tujuan sekolah, menjadikan hal tersebut membutuhkan seorang pemimpin yang disebut kepala sekolah untuk mencapai apa yang menjadi target mereka sebagai satuan pendidikan formal. Kepala sekolah dapat melakukan inovasi dan improvisasi sekolah terkait masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial, dan lain sebagainya (Uni Wahyuni, *dkk.*, 2017: 80). Banyaknya tugas tersebut, membuat seorang kepala sekolah harus memiliki kapabilitas khusus. Di mana kapabilitas yang dimaksud ditujukan bagi individu-individu yang cakap untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun, seringkali posisi kepala sekolah mengalami permasalahan, terkait siapa yang pantas menduduki posisi tersebut. Terlebih lagi, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang dikelola oleh perempuan dalam proses keberlangsungan satuan pendidikan terkhusus yakni Sekolah Menengah Atas (SMA).

Permasalahan disintegrasi akibat ketidaksetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam hal kepemimpinan, menjadi penghalang bagi

perempuan untuk menduduki sebuah posisi yang lebih tinggi dalam suatu lembaga/organisasi. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat membuat partisipasi perempuan dalam pekerjaannya lebih rendah daripada laki-laki. Padahal dalam komposisinya, perempuan cenderung lebih banyak masuk dalam lingkup kerja dibandingkan dengan laki-laki. Komposisi yang dimaksud, dapat dilihat dalam karier perempuan dan laki-laki yang berprofesi sebagai guru pada beberapa kabupaten di wilayah Indonesia, terutama pada wilayah pedesaan maupun sub-urban. Ketimpangan ini pernah ditemukan melalui penelitian mikro, yang menjadi dasar penulisan laporan studi INOVASI (2021) , mengatakan bahwa guru perempuan di sekolah dasar, di seluruh Indonesia berjumlah hampir satu juta, dari total 1.433.794 guru (laki-laki dan perempuan). Mayoritas guru perempuan ini mencakup perbandingan 70% lebih besar daripada guru laki-laki. Perbandingan yang lebih besar ini tidak selaras dengan jumlah perempuan yang mampu mencapai posisi kepala sekolah, yakni hanya sebesar 20% (Senza Arsendy, 2020, p.1) .

Tabel 1.1 Data Guru Provinsi Lampung

| No | Wilayah | Total | | | SMP | | | SMA | | | SMK | | | SLB | | |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|---|
| | | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P |
| 1 | Kab. Lampung Tengah | 16.638 | 5.026 | 3.320 | 1.258 | 2.062 | 1.442 | 552 | 890 | 1.235 | 630 | 605 | 37 | 9 | 28 | |
| 2 | Kota Bandar Lampung | 13.574 | 2.953 | 3.062 | 819 | 2.243 | 1.774 | 583 | 1.191 | 1.536 | 516 | 1.020 | 96 | 17 | 79 | |
| 3 | Kab. Lampung Timur | 12.625 | 3.790 | 2.383 | 976 | 1.407 | 1.112 | 445 | 667 | 1.262 | 623 | 639 | 25 | 9 | 16 | |
| 4 | Kab. Lampung Selatan | 12.203 | 3.078 | 2.205 | 699 | 1.506 | 1.049 | 383 | 666 | 1.163 | 505 | 658 | 19 | 3 | 16 | |
| 5 | Kab. Lampung Utara | 8.905 | 2.037 | 1.678 | 487 | 1.191 | 991 | 311 | 680 | 665 | 264 | 401 | 23 | 7 | 16 | |
| 6 | Kab. Tanggamus | 8.214 | 2.302 | 1.411 | 491 | 920 | 626 | 229 | 397 | 500 | 216 | 284 | 14 | 5 | 9 | |
| 7 | Kab. Way Kanan | 7.202 | 2.053 | 1.335 | 462 | 873 | 724 | 241 | 483 | 553 | 254 | 299 | 15 | 5 | 10 | |
| 8 | Kab. Pringsewu | 6.215 | 1.909 | 1.204 | 417 | 787 | 625 | 243 | 382 | 821 | 427 | 394 | 29 | 11 | 18 | |
| 9 | Kab. Pesawaran | 5.992 | 1.451 | 1.101 | 339 | 762 | 480 | 151 | 329 | 331 | 133 | 198 | 6 | 2 | 4 | |
| 10 | Kab. Tulang Bawang | 5.623 | 1.579 | 1.185 | 438 | 747 | 457 | 159 | 298 | 455 | 200 | 255 | 8 | 2 | 6 | |
| 11 | Kab. Lampung Barat | 4.093 | 1.278 | 964 | 330 | 634 | 473 | 155 | 318 | 337 | 147 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 4.080 | 1.090 | 922 | 300 | 622 | 370 | 111 | 259 | 301 | 151 | 150 | 17 | 3 | 14 | |
| 13 | Kota Metro | 3.679 | 1.045 | 710 | 241 | 469 | 550 | 194 | 356 | 639 | 294 | 345 | 70 | 18 | 52 | |
| 14 | Kab. Pesisir Barat | 3.178 | 962 | 812 | 279 | 533 | 308 | 109 | 199 | 142 | 59 | 83 | 8 | 3 | 5 | |
| 15 | Kab. Mesuji | 3.127 | 990 | 643 | 239 | 404 | 219 | 90 | 129 | 243 | 112 | 131 | 11 | 3 | 8 | |
| Total | | 115.348 | 31.543 | 22.935 | 7.775 | 15.160 | 11.200 | 3.956 | 7.244 | 10.183 | 4.531 | 5.652 | 378 | 97 | 281 | |

Sumber : dapo.kemdikbud.go.id, 2023

Komposisi kerja sebagai guru antara perempuan dan laki-laki Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki kabupaten-kabupaten wilayah pedesaan atau sub-urban, juga terdistribusi dalam jumlah yang berbeda. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Provinsi Lampung, terdapat terdapat total 115.406 guru, yang terdiri dari 83.989 jumlah guru perempuan dan 31.417 jumlah guru laki-laki. Data-data yang ada, menjadi lebih spesifik dan terlihat bahwa terdapat sebuah masalah komposisi guru perempuan dan posisi kepala sekolah di Kabupaten Pringsewu, terutama pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekitar 11.200 guru perempuan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan komposisi 3.956 jiwa merupakan guru laki-laki, dan 7.244 jiwa merupakan guru perempuan (*dapo.kemdikbud.go.id*, 2023, p.1.).

Internship selama 40 hari yang dilakukan peneliti, menjadi langkah penting sebagai sarana untuk melakukan pra-observasi penelitian sehingga dapat menemukan fokus permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan. Ada pun *Internship* tersebut dilakukan pada salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pringsewu. Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi dua kategori yakni SMA negeri dan swasta berbasis Islam atau pun Katolik. Sekolah negeri, dalam proses pemilihan kepala sekolahnya dipilih langsung oleh dinas pendidikan provinsi, sedangkan sekolah swasta bergantung pada sistem kelola satuan pendidikan dengan kewenangan tersendiri. Sekolah swasta dengan kewenangan yang dimiliki, memperjelas ketimpangan komposisi kepala sekolah perempuan dan laki-laki di Kabupaten Pringsewu. Kewenangan ini yang menghasilkan siapa saja yang dapat menduduki posisi kepala sekolah di satuan pendidikan mereka masing-masing. Posisi kepala sekolah yang sedang dilaksanakan pada 10 sekolah swasta di Kabupaten Pringsewu yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data SMA Swasta Beserta Kepala Sekolah di Kabupaten Pringsewu

| No. | Nama SMA Swasta | Nama Kepala Sekolah | Jenis Kelamin |
|-----|------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | SMA Xaverius Pringsewu | Petrus Risdianto | Laki-Laki |
| 2 | SMA Muhammadiyah Pringsewu | Drs. Irwan Aspadi | Laki-Laki |
| 3 | SMA Pelita Madani Pringsewu | Pebri Arisandi | Laki-Laki |
| 4 | SMA IT Al Hidayah Pringsewu | Candra Pravoga | Laki-Laki |
| 5 | SMA PGRI Pagelaran | Sarmanto | Laki-Laki |
| 6 | SMA Muhammadiyah Gading Rejo | Sutomo Wirakusuma | Laki-Laki |
| 7 | SMA Ma'arif Keputran | Bhernad Abbas | Laki-Laki |
| 8 | SMA Bina Mulya Gading Rejo | Muhammad Alimi | Laki-Laki |
| 9 | SMA PGRI 2 Pringsewu | Lukman | Laki-Laki |
| 10 | SMA Yasmida | Srikanti Rahayu | Perempuan |

Sumber : Data Sekolah Kemdikbud, 2023

Dapat dilihat dari 10 sekolah swasta tahun ajaran 2023/2024 pada tabel di atas, hanya satu yang menjabat sebagai kepala sekolah dalam satuan pendidikan menengah atas. Pemerintah masih terus meningkatkan dengan pemberian kebebasan bagi seluruh guru mengikuti guru penggerak untuk mampu menjadi pemimpin dalam lembaga/organisasi khususnya bidang pendidikan. Walaupun begitu, setiap sekolah memiliki kewenangan lain yang menjadi salah satu faktor di dalamnya termasuk nilai-nilai atau kriteria yang harus hadir dalam diri seorang kepala sekolah. Dari ke-10 sekolah yang ada, hanya satu sekolah yang merupakan sekolah swasta dengan penghayatan iman Katolik, yakni SMA Xaverius Pringsewu. Jika pada sekolah negeri segala keputusan jabatan dicampurtangani oleh dinas pendidikan, sekolah swasta seperti SMA Xaverius Pringsewu memiliki proses tersendiri dalam mencapai posisi kepala sekolah, yang diatur oleh yayasan, yakni Yayasan Xaverius Tanjungkarang. Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius dipilih peneliti untuk menjadi objek penelitian sebagai bentuk pengabdian atau balas budi, atas bantuan administratif pihak sekolah dalam memperoleh pendidikan tingkat tinggi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan bebas biaya pendidikan. Terlebih lagi peneliti menemukan permasalahan tentang kepemimpinan kepala sekolah yang

terlihat tidak seimbang dalam pencapaiannya antara laki-laki dan perempuan.

Kepemimpinan kepala sekolah secara terbuka bagi kaum awam (di luar keuskupan) hadir dalam lembaga pendidikan/satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Pringsewu sebagai sekolah Katolik milik Yayasan Xaverius Pringsewu. Terbukti dari 9 dekade kepemimpinannya mulai dari 1) FX. Moh. Chamdani (1968), 2) P.C. Saemoko (1969), 3) Y. Basuki Sujarwo (1969-1974), 4) B. Sugeng Wahyudi (1974-1975), 5) Sr. M. Augusta, FSGM (1976), 6) Drs. P. P. Situmorang (1976-1986), 7) Drs. FB. Marsudi (1986-2006), 8) Drs. M. Suharto (2006-2018), dan 9) Petrus Risdianto, S.Pd., yang menjabat sejak 2018 hingga saat ini. Regulasi yang terhubung bagi kepala sekolah ini dengan yayasan terjalin linear dan segala hal yang diputuskan harus diketahui oleh pemimpin yayasan.

Berdasarkan kepemimpinan 9 kepala sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Pringsewu, terlihat kejanggalan dalam struktur kepemimpinannya. Ditemukan belum terulangnya kembali kepemimpinan oleh perempuan selama 48 tahun, yang menempati posisi sebagai kepala sekolah. Padahal, sebagai lembaga pendidikan Katolik, yayasan menerapkan nilai-nilai teladan Fransiskus Xaverius yakni Humanis, Kecerdasan, Kejujuran, Kedisiplinan dan Pelayanan (HK3P) yang menjunjung tinggi kebersamaan tanpa diskriminasi, sehingga hal tersebut berarti semua pihak baik perempuan dan laki-laki dapat menduduki posisi tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung untuk semua pekerja terlebih lagi perempuan, dapat menduduki posisi kepala sekolah hadir untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Namun, masih ditemukan masalah terkait kepemimpinan kepala sekolah yang sudah lama terjadi, sehingga peneliti mengangkat judul **“Aspirasi Karier Guru Perempuan Terhadap Posisi Kepala Sekolah di SMA Xaverius Pringsewu”** untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan penelitian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana guru perempuan memaknai kariernya di SMA Xaverius Pringsewu ?
2. Bagaimana guru perempuan memaknai posisi kepala sekolah di SMA Xaverius Pringsewu ?

B. Kerangka Konseptual

- **Kerangka Konseptual**

1. **Makna Subjektif dari Tindakan Rasional (Max Weber)**

Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasari oleh motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Tindakan-tindakan tersebut ditekankan Weber bahwa tiap individu memiliki arti subjektif di dalamnya. Arti subjektif ini menjadi sisi penting dalam melihat individu atas interpretasi dan motivasinya dalam melakukan sebuah tindakan. Di mana, hal tersebut dianggap sebagai rasionalitas yang didalamnya terdapat faktor-faktor seperti ekonomi, organisasi, evolusi, musik, dan lain sebagainya yang tertuang dalam pikiran, intelektual, dan logika atau pada hati seperti perasaan, sentiment, serta emosi. Weber juga melihat tiap-tiap individu memiliki posisi nomineer/nominalis yang riil (secara objektif). Konsep Verstehehen dimunculkan Weber untuk mendapatkan pemahaman akurat mengenai arti-arti subjektif atas tindakan sosialnya. Tidak hanya untuk meninjau ke dalam (introspeksi), tetapi untuk melihat kemampuan peneliti memposisikan diri dalam kerangka berpikir subjek penelitiannya yang segala tindakannya atas tujuannya terdefinisi dari perspektif tersebut (Doyle Paul Johnson, 1988: 216-219).

Dalam melakukan setiap tindakannya, individu memiliki klasifikasi atas tindakan yang dilakukan yakni rasional dan non rasional. Weber menjelaskan bahwa tindakan rasional adalah segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan secara sadar dan keputusan yang dibuat atas tindakan tersebut. Tindakan rasional ini terbagi menjadi dua tingkatan yakni: *Pertama*, tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini mencerminkan para individu yang melakukan sesuatu hal atas tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai hal tersebut. Keputusan yang dibuat atas tindakan yang dilakukan adalah hasil dari pertimbangan dari individu atas efisiensi dan efektivitasnya. *Kedua*, tindakan rasionalitas nilai. Dalam hal ini, individu melakukan tindakan atas nilai absolut dan yang diimani dalam diri mereka. Nilai-nilai akhir secara non rasional ini, tidak dapat diperhitungkan secara objektif atas tujuan-tujuan yang harus diputuskan. Komitmen yang terbangun atas nilai-nilai dalam diri individu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang berguna, efisien, dan tidak relevan. Individu yang memiliki interpretasi rasionalitas nilai, tidak akan memperhitungkan hal tersebut (Doyle Paul Johnson, 1988: 220-221) .

Dalam penelitian ini, makna subjektif dalam perilaku guru perempuan yakni berprofesi sebagai guru menjadi alat untuk melihat bagaimana keinginan mereka dalam kelanjutan kariernya.

2. Karier Guru

Rohmansyah & Setiyawan (2018) menyebutkan bahwa guru merupakan sebutan bagi salah satu profesi/pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu. Profesi guru terus melalui pengembangan baik secara kompetensi soal pedagogik atau dasar

pengajaran, kepribadian yang mencakup emosional, juga secara sosial dan professional. Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai guru, karier yang melingkupinya juga harus turut dikembangkan (Munawir, *dkk*, 2022: 75).

Hasanah (2016) mendeskripsikan karier guru sebagai kemajuan dan proses perkembangan yang sistematis dan telah dicapai seseorang sebagai guru terhadap profesinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan, bahkan meningkatkan kualitas tersebut hingga mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Munawir, *dkk.*, 2022: 76). Karier juga dimaknai yakni sebagai 1) Urutan promosi atau pemindahan bidang kerja ke jabatan kerja yang lebih menuntut tanggung jawab, 2) Penunjuk pekerjaan yang menghasilkan pola sistematis dan jelas sehingga disebut jalur karier, dan 3) Serangkaian proses pekerjaan seseorang atau posisi yang dilakukannya selama kehidupan kerja berlangsung. Peningkatan kualitas guru juga diartikan Kusumah & Awaliyah (2021) berdasarkan definisi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai seseorang yang menggerakkan kelompok belajar untuk guru disekolah maupun dalam wilayahnya untuk meningkatkan kepemimpinan peserta didik dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila (Susi, *dkk.*, 2023).

3. Kepala Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, kepala sekolah merupakan seorang guru dengan wewenang dan tugas dalam memimpin maupun mengelola satuan pendidikan (*peraturan.bpk.go.id*, 2018, p.3). Seseorang yang menjadi kepala sekolah telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk memantapkan

wawasan, pengetahuan, sikap, nilai maupun keterampilan dalam memimpin sekolah. Kemudian, periode waktu yang diselenggarakan pada jabatan tersebut berdurasi lima tahun sekali (pergantian).

Menurut Sutisna (1998: 331) , dalam jabatannya, seorang kepala sekolah yang menjadi pelaksana teknis dan manajerial yang dibentuk melalui pelatihan calon kepala sekolah, bertugas untuk melaksanakan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia sekolah, fasilitas, keuangan, tata usaha, tata tertib, dan komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat setempat. Selain itu, kepala sekolah sebagai pelaksana teknis juga memiliki tugas administratif seperti melakukan perencanaan, pengambilan keputusan atas diskusi sumber daya manusia yang ada tentang pengoperasian sekolah, mengawasi dan menilai hasil kerja sumber daya manusia, melakukan sosialisasi dan perintah atas aturan sekolah, sebagai mediator dalam konflik sekolah, juga memberikan semangat kepada sumber daya sekolah yang ada (Rohiat, 2008: 14).

4. Gender Leadership GAP

Gender gap merupakan sebuah situasi ketidasetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dipicu oleh faktor eksternal maupun internal di tengah masyarakat (Mei Suryanti & Nimatush Sholikhah, 2021: 285-249). Terdapat penghalang yang membuat perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Baxter & Wright (2000) mengatakan bahwa terdapat penghalang transparan (*glass ceiling*) yang menghalangi perempuan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi pada suatu organisasi atau lembaga (Maulida Nurul I. & Bima Cinintiya P., 2019: 8-9).

Perbedaan yang muncul pada posisi laki-laki dan perempuan di masyarakat menghasilkan diskriminasi dalam bentuk bias gender yang menjadi masalah pada kepemimpinan dalam gender. Dikatakan pada kajian literatur Eagly & Charli (2007), bahwa masalah kepemimpinan dalam gender terjadi antara proses kualifikasi kerja yang tidak adil dan diskriminatif, yang menyebabkan ketidakmampuan perempuan dalam memimpin dan mengelola organisasi dan lembaga. Di mana, gangguan yang menyebabkan hal tersebut bersumber dari persoalan eksternal berupa tantangan, peluang, kompetisi, pengalaman kerja, tekanan, dan kompleksitas kontribusi terhadap pengembangan organisasi/lembaga seperti pangkat dan kuasa gender, selain dari persoalan internal dari dalam diri individu (Bixia Gong, 2023: 886-887).

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian kualitatif milik Anna Margaret dan Tim Cakra Wikara Indonesia (2021), ingin menemukan jawaban atas perempuan yang kurang terwakili sebagai kepala sekolah di Sekolah Negeri dan Madrasah. Temuan dalam penelitian ini adalah beberapa dimensi yang menjadi hambatan multidimensional yakni 1) *Dimensi regulasi*, yang ditemukan tim peneliti sebagai suatu hal terkait dengan kriteria dan pengedepanan syarat umum dari seorang kepala sekolah. 2) *Dimensi kultural*, yang menekankan pada pembagian peran antara perempuan dan laki-laki, dan 3) *Dimensi waktu*, berkaitan dengan peran produktif, reproduktif, dan aktivitas ekonomi yang melekat pada perempuan secara simultan.

Penelitian Rahmad Affandi, *dkk.* (2021), dilakukan untuk melihat pola kepemimpinan baru di sekolah berbasis Islam. Penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan pun, diharapkan mampu mengurai dan memetakan gaya kepemimpinan, juga mengkaji stereotipe peran kepala

sekolah perempuan berbasis Islam. Hasil penelitian yang ditemukan yakni 1) Terdapat transformasional kharisma dengan basis pendekatan yang bersifat merangkul semua pihak untuk mengkondisikan situasi kerja lebih baik, serta 2) Pola kepemimpinan instruksional dan partisipatif, termasuk mendukung dalam pembuatan konsensus, mendorong harga diri, berpartisipasi aktif, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kepemimpinan dan pola tersebut merupakan proses kolaboratif kepemimpinan yang fasilitatif (*facilitative leadership*). Menjadi pemimpin di lembaga yang mayoritas anggotanya adalah laki-laki, posisi kepala sekolah yang ditemukan ini menepis stereotipe bahwa perempuan dianggap tidak dapat berhasil dalam kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan, kepala sekolah perempuan dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam bidang akademis, sehingga MTs dapat berjalan dengan baik.

Penelitian deskriptif milik Ignasius Rio & Agustinus Supriyadi (2022), dilakukan dengan tujuan melihat penerapan model kepemimpinan yang melayani dan berasaskan Roh serta Spirit kepemimpinan Yesus di sekolah Katolik milik Yayasan Yohanes Gabriel IV, sekitar Kota Madiun. Hasil penelitian yang ditemukan adalah konsep “*Servant Leadership*” yang dicetuskan Robert K. Greenleaf, hadir dalam diri seorang pemimpin sekolah Katolik. Karakteristik yang melekat pada diri tersebut yakni 1) Mendengarkan, 2) Empati, 3) Persuasi, 4) Kesadaran, 5) *Visioner*; dan lain sebagainya. Penerapan karakteristik ini bersifat melayani, yang menunjukkan bahwa pemimpin di sekolah-sekolah Katolik menjadikan nilai pelayanan sebagai Roh atau semangat dalam memimpin sekolah yang dipercayakan kepadanya.

Penelitian kualitatif yang dilakukan Mateus Frederikus Solo Lion (2021), bertujuan untuk mengetahui implementasi trilogi kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara di SMA Katolik, Kabupaten Bantul (studi kasus di SMA Stella Duce Bambanglipuro dan SMA Pangudi Luhur Sedayu). Trilogi yang di maksud ialah semboyan pendidikan yang terkenal, yakni *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Hasil penelitian ini adalah 1) Perencanaan yang dilakukan sebagai implementasi

konsep trilogi Ki Hadjar Dewantara yakni dengan mengkonsolidasi kepala sekolah bersama wakilnya sebagai SDM pembantu di berbagai kegiatan sekolah, dan 2) Pengkoordinasian dilakukan dengan penerapan konsep “pemimpin menjadi panutan dan teladan” yang memiliki etos serta kedisiplinan kerja.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak *Internship* pada Agustus 2023 hingga Bulan Maret 2024 di SMA Xaverius Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Hal tersebut dilakukan *untuk* meneliti lebih lanjut mengenai terkait 1) Pemaknaan posisi kepala sekolah oleh guru perempuan, dan 2) Pemaknaan karier sebagai guru oleh guru perempuan, sehingga dapat diketahui aspirasi (keinginan untuk ke posisi pekerjaan yang lebih tinggi) para guru perempuan mengenai posisi kepala sekolah.

E. Sistematika Penulisan

Pada penulisan laporan penelitian ini, terdapat 4 bab yang didalamnya terdiri dari:

1. BAB I: Pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, kerangka konsep, kerangka berpikir, serta tujuan dari dilakukannya penelitian ini.
2. BAB II: Metodologi dan Deskripsi Subjek Penelitian berisi tentang jenis dan metode penelitian yang diterapkan, operasionalisasi konsep yang diterapkan, metode pengumpulan data yang diterapkan, termasuk penjelasan mengenai jenis data dan cara analisisnya. Kemudian, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai informasi dari keseluruhan subjek penelitian di SMA Xaverius Pringsewu.
3. BAB III: Temuan dan Pembahasan terdiri dari dua bagian yakni bagian temuan dan pembahasan. Temuan penelitian menjelaskan segala sesuatu yang didapatkan dalam proses observasi penelitian dan gambaran yang terjadi dalam penelitian. Pembahasan berisi tentang bagaimana tindakan

rasional nilai dan instrumental terjadi dalam lingkup guru perempuan di SMA Xaverius Pringsewu terhadap posisi kepala sekolah.

4. BAB IV: Kesimpulan berisi rangkuman hasil akhir dari keseluruhan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian, serta terdapat evaluasi dan saran dari hasil temuan penelitian.

